

**USULAN
INDIKATOR
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

GPPI

(Gerakan Perempuan
Peduli Indonesia)

Tim penyusun

Rita Kalibonso (Mitra Perempuan)
Carla Nata (APWAPS)
Listyowati (Kalyanamitra)
Rena Herdiyani (Kalyanamitra)
Adriana Venny (KOMNAS Perempuan)
Atas Hendartini Absah (PKBI)
Ninuk Widyantoro (YKP)
Syamsyiah Achmad
Ruby Khalifah (AMAN Indonesia)
Rudolf Bastian (Perwakilan LGBT)
Yuda Irlang (Ansipol)

Editing: Rena Herdiyani dan Ruby Khalifah
Layout/Desain: Morenk Beladro

Daftar Isi

Kata Pengantar

USULAN INDIKATOR GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Gol 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana adanya

Gol 2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan

Gol 3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

Gol 4 Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua

Gol 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

Gol 6 Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua

Gol 7 Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua

Gol 8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua

Gol 9 Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi

Gol 10 Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara

Gol 11 Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan

Gol 12 Memastikan pola konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan

Gol 13 Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

Gol 14 Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan

Gol 15 Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati

Gol 16 Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inclusive di semua level

Gol 17 Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

PENUTUP

Kata Pengantar

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen besar Indonesia dan negara-negara sedunia yang disepakati pada 25 September 2015 di PBB, New York. Sebuah komitmen besar untuk menciptakan sebuah dunia yang adil, sejahtera bagi rakyat dan bumi. Dokument SDGs yang memuat 17 Goals (Tujuan) dan 169 Targets (Sasaran) berupaya mentransformasi dunia guna mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan, ketidak-adilan gender, penyelamatan bumi dan pemajuan ekonomi bagi semua.

Dengan mimpi besar agar tidak ada seorangpun yang akan tertinggal, maka kerangka pembangunan global ini secara proses jauh lebih partisipatif dibandingkan dengan Millenium development Goals (MDGs). Secara substansial SDGs lebih menunjukkan keperpihakan pada pemenuhan HAM dan kesetaraan gender yang ditunjukkan dalam stand alone gol 5 yaitu Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial, lingkungan yang berkelanjutan terelaborasi dengan baik tidak hanya dalam gol tertentu tetapi juga cross cutting, sehingga menunjukkan bahwa antar gol satu dengan yang lain memiliki keterkaitan.

Buku sederhana yang ada di tangan anda ini merupakan dokumen usulan masyarakat sipil yang bekerja di pemberdayaan perempuan dan pembelaan HAM Perempuan. Mengutip pidato Sekjend PBB, Ban Ki Mon pada Pembukaan sidang CSW 59 pada Maret 2015 bahwa tidak satupun negara yang mencapai kesetaraan gender, maka tentu saja penting bagi masyarakat sipil perempuan Indonesia untuk memastikan bahwa kerangka pembangunan global SDGs haruslah mendorong pencapaian kesetaraan gender.

Proses penyusunan dokumen ini dilakukan secara transparan dan inklusif dengan melibatkan perwakilan masyarakat sipil pada konsultasi nasional tanggal 4 September 2015 bersama dengan Bappenas termasuk melibatkan kelompok-kelompok marginal. Kemudian, draft hasil diskusi

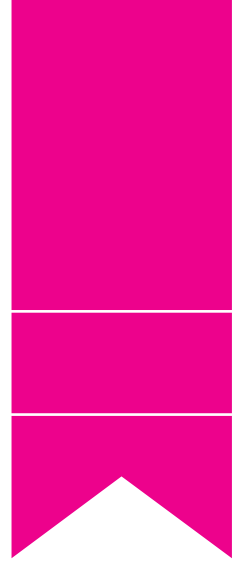
diperdalam dengan diskusi mingguan dengan anggota GPPI untuk memper-
tajam dan memformulasi dalam bahasa indikator.

Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) sebagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh gerakan perempuan masyarakat sipil bersama Kom-
nas Perempuan dan KPAI yang melakukan advokasi hak-hak asasi manusia dan hak asasi perempuan sesuai komitmen Indonesia pada CEDAW 1979 (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Wom-
en), ICPD 1994 (International Conference on Population Development) dan BPFA 1995 (Beijing Platform for Action) serta MDGs 2000 (Millenium Development Goals). Dalam waktu dekat yakni Maret 2016, akan disepakati dan diadopsi indikator-indikator

Semoga buku ini bisa menjadi pegangan para pengambil keputusan dalam menyusun indikator nasional untuk pembangunan berkelanjutan.

Rita Serena Kalibonso

Kordinator GPPI



USULAN INDIKATOR GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

USULAN INDIKATOR GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sesuai dengan Outcome document yang disahkan oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015 di New York, kerangka kerja Milineum Develoopment Goals secara resmi berakhir. Sebuah framework baru yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), atau Pembangunan Berkelanjutan telah diresmikan. Kerangka kerja global pembangunan berkelanjutan ini terdiri dari 17 Gol dan 169 Target. Gol 5 dikhususnya untuk berbicara kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi perspektif gender juga maintream di semua gol yang ada.

Untuk memastikan bahwa gender-responsive indicators itu ada di dalam semua gol, maka penting menurunkannya ke dalam indikator yang lebih detil. Berikut adalah usulan masyarakat sipil pejuang HAM Perempuan dan anak Indonesia yang merasa penting memberikan kontribusi pada pemerintah nasional untuk mengintegrasikan indiaktor gender ke dalam dokumen turunan SDGs yang akan dijalankan di Indonesia.

Ada tiga isu penting di dalam Indikator gender yang dimasukan ke dalam target-target yaitu isu ketersediaan, keterjangkauan dan keselamatan dalam melihat dimensi politik, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat. Kesemuanya diturunkan dalam indiaktor detil per target. Secara detil usulan indikator bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Gol 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana adanya

TARGET

1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang dimanapun, dimana ukuran yang digunakan sekarang adalah mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$ 1,25 perhari

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya separuh proporsi dari laki-laki, perempuan dan anak-anak segala umur yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensi menurut definisi nasional

INDIKATOR

1. Proporsi penduduk berdasarkan data terpilah berdasarkan gender, usia dan kerentanan, kota dan desa yang memiliki penghasilan kurang dari \$ 1,25 per hari
2. Cakupan perempuan yang mendapatkan perlindungan sosial nasional (kesehatan, ketenagakerjaan, sandang, pangan, papan)
3. Multidimensional Indeks Kemiskinan (Bappenas dan Kemensos)
4. Jumlah kebijakan dan peraturan yang mendiskriminasi perempuan baik nasional dan daerah, khususnya yang mengarah pada kemiskinan perempuan. Misalnya UU Perkawinan, Perda diskriminatif, UU Adminduk.
5. Perbaiki sistem pendataan nasional yang memastikan identitas hukum yang jelas bagi perempuan

1. Menurunnya persentase perempuan dan perempuan kepala rumah tangga di kota dan di desa yang mampu menikmati lebih dari 60% kebutuhan dasarnya termasuk persentase perempuan yang memiliki tanah dan persentase perempuan yang diakui dan dilindungi kepemilikan tanah, property (harta benda, warisan) dan SDA-nya
2. Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (di bawah \$1,25)

3. Total Fertility Rate (TFR)
4. Multidimensional Indeks Kemiskinan
5. Poverty Gap Ratio (Gunakan Indikator MDG)

1.3 Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level, dan pada tahun 2030 sudah mencapai cakupan yang cukup substansial terhadap yang miskin dan rentan

1. Persentase penduduk perempuan usia lanjut yg mendapat pension, jaminan kesehatan dan jaminan sosial
2. Persentase penduduk perempuan disabilitas yg mendapat jaminan kesehatan, jaminan sosial pekerjaan, dan akses ke perbankan dan permodalan
3. Persentase perempuan kepala keluarga yg mendapat jaminan kesehatan, jaminan sosial, pekerjaan, akses ke perbankan dan permodalan
4. Persentase perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga yg mendapat bantuan keuangan

1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, juga terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial, termasuk keuangan mikro

1. Berkurangnya pelanggaran atas hak kepemilikan perempuan atas tanah dan bangunan
2. Persentase perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga yg mendapat jaminan kesehatan, jaminan sosial, pekerjaan, akses ke perbankan dan permodalan
3. Menurunnya persentase perempuan dan perempuan kepala rumah tangga di kota dan di desa yang mampu menikmati lebih dari 60% kebutuhan dasarnya termasuk persentase perempuan yang memiliki tanah dan persentase perempuan yang diakui dan dilindungi kepemilikan tanah, property (harta benda, warisan) dan SDA-nya

	<p>4. Jumlah perempuan yg mendapat akses dan menikmati teknologi baru</p> <p>5. Jumlah perempuan yg mendapat akses perbankan dan permodalan</p>
<p>1.5 Pada tahun 2030, membangun daya tahan mereka yang miskin dan yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi situasi tanpa perlindungan dan kerentanan terhadap kejadian-kejadian ekstrim yang berhubungan dengan perubahan iklim, juga kejutan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya</p>	<p>1. Jumlah perempuan yang kehilangan harta benda saat bencana (alam dan human made) dan perubahan iklim</p> <p>2. Jumlah perempuan yang memahami resiko kebencanaan dan memiliki kesiapsiagaan, ketahanan dan kemampuan adaptasi</p> <p>3. Jumlah perempuan yang meninggal, hilang, terluka, yg dipindahkan/evakuasi saat bencana (alam dan human made) dan perubahan iklim (per 100,000)</p>
<p>1.a Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam rangka menyediakan alat-alat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya</p>	<p>1. Persentase bentuk kerjasama dan bantuan resmi pembangunan untuk mengurangi kemiskinan, mewujudkan pembangunan yang inklusif dan adil gender</p>
<p>1.b Menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan</p>	<p>1. Jumlah kebijakan yang diciptakan untuk mewujudkan keadilan gender dan menghapuskan semua bentuk diskriminasi</p> <p>2. Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik diskriminatif yang dihapus</p>

Gol 2 :

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan

TARGET

2.1 Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi dan berkecukupan sepanjang tahun

2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil dan menyusui dan manula

INDIKATOR

1. Berkurang secara signifikan jumlah kelaparan dan kurang gizi, terutama warga negara miskin dan kelompok rentan, khususnya perempuan hamil dan menyusui, balita, remaja, tenaga kerja perempuan dan lansia
2. Meningkatnya jumlah perempuan yang mengakses lahan pertanian dan perkebunan (kehutanan) berkelanjutan
3. Meningkatnya akses perempuan terhadap diversifikasi pangan nasional

1. Persentase perempuan yang rentan mengalami kurang gizi dan gizi buruk
2. Persentase bayi baduta (stunting) dan mengalami kecacatan krn kekurangan nutrisi dlm kandungan
3. Prevalensi berat (stunting-cebol) dan lengan balita
4. Persentase bayi dibawah 6 bulan yang ASI Eksklusif
5. Persentase perempuan usia 15-49 tahun yang mengalami anemia
6. Percentage of population with shortfalls of: iron, zinc, iodine, vitamin A, folate, vitamin B12 [and vitamin D]

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian

1. Persentase perempuan yang berhasil melipatgandakan produksi dan nilai produksi, kepemilikan, jenis usaha dan skala usaha

2.4 Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplemantasikan paktek- praktek agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah

1. Meningkatnya produksi pangan lokal yang aman dan berkelanjutan
2. Meningkatnya penyediaan benih tanaman dan hewan lokal yang aman dan berkelanjutan
3. Research &Development pertanian dan pembangunan desa yang melibatkan perempuan dan dampak terhadap riset tersebut pada (tubuh) perempuan

2.5 Pada tahun 2020, memelihara keanekaragaman genetika benih, mengolahtanaman dan persawahan serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan baik keragamannya pada level nasional, regional dan

1. Jumlah perluasan pekerja petani perempuan per 1000 petani
2. Jumlah perempuan yang terlibat dalam pelestarian keragaman genetika benih, tanaman budidaya dan bertani dan hewan peliharaan domestik dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui pengelolaan dan beragam benih dan bank tanaman di tingkat nasional , regional dan internasional , dan

intensional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional, seperti yang telah disepakati secara internasional

menjamin akses yang adil dan merata yang berasal dari penggunaan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional terkait, seperti yang disepakati secara internasional.

2.a Menaikkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang diperluas, dalam hal infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan perluasan pelayanan, pengembangan teknologi dan tanaman serta bank genetik ternak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi agrikultur di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara kurang berkembang

1. Jumlah perempuan yang terlibat dalam peningkatan kerjasama internasional, infrastruktur pedesaan, penelitian dan penulhan pertanian, pengembangan
2. Jumlah perempuan yang menerima investasi dan kerjasama internasional

2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar agrikultur dunia, termasuk melalui penghilangan bersamaan dari segala bentuk subsidi ekspor agrikultur dan semua ukuran ekspor lainnya yang memiliki efek yang sama, sesuai dengan mandat Putaran Pembangunan Doha

Jumlah pengkoreksian dan pencegahan pembatasan-pembatasan perdagangan yang berdampak terhadap perempuan

2.c Mengadopsi ukuran-ukuran yang dapat memastikan fungsi yang layak bagi pasar komoditi pangan dan turunannya dan memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, termasuk persediaan pangan, dalam rangka untuk membatasi pergolakan ekstrim harga bahan pangan

1. Meningkatnya perlindungan dan menjamin pertumbuhan pasar-pasar tradisional (pasar lokal) serta membatasi tumbuhnya pasar modern di tingkat lokal
2. Jumlah dampak langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas makanan dan turunannya dan memfasilitasi akses yang tepat waktu terhadap informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membantu

membatasi volatilitas harga makanan terhadap perempuan

3. Jumlah perempuan hamil dan menyusui maupun balita mendapatkan makanan sehat dan bergizi yang mencukupi.

Gol 3 :

Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

TARGET

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran

INDIKATOR

1. Angka Kematian Ibu (Indikator MDG)
2. Persentase kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih (Indikator MDG)
3. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan sedikitnya empat kali kunjungan) (Indikator MDG)
4. Cakupan perawatan ibu post – natal/ nifas (satu kali kunjungan) (Indikator MDG)
5. Cakupan suplemen asam folat besi (Fe) untuk ibu hamil (%)
6. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki pelayanan spesialis 4 besar (kandungan, anak, internist dan anestesi)

7. Persentase perempuan yang melahirkan di bawah usia 18 tahun (Adolescent Fertility Rate)

8. Adanya Perda dan anggaran bagi pelaksanaan pendidikan CSE-SRHR baik untuk komunitas dan health providers

9. Peningkatan jumlah bidan berkualitas melalui beasiswa bidan perempuan (Bupati)

10. Peningkatan fasilitas untuk bidan

11. Adanya peraturan yang melindungi anak untuk tidak dinikahkan <18 tahun

12. Adanya kelompok strategis yg khusus memantau di lingkungan sekitar (misalnya, kasus perkawinan anak)

13. Persentase kematian ibu akibat komplikasi aborsi

14. Angka aborsi pada perempuan usia 15-45 tahun

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, dimana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran

1. Persentase bayi di bawah 6 bulan yang ASI eksklusif

2. Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal (Dimodifikasi dari Indikator MDG)

3. Persentase bayi dan anak-anak yang menerima imunisasi lengkap (seperti yang direkomendasikan oleh jadwal vaksinasi nasional)

4. Persentase kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih (Indikator MDG)

5. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan sedikitnya empat kali kunjungan) (Indikator MDG)

6. Cakupan perawatan bayi post - natal (satu kali kunjungan) (Indikator MDG)

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya

7. Jumlah kasus diare pada balita yang dibawa ke fasilitas kesehatan

8. Persentase jumlah balita yang demam dan diobati dengan obat anti - malaria yang tepat (Indikator MDG) dibawa ke fasilitas kesehatan

1. Persentase bayi dan anak-anak yang menerima imunisasi lengkap (seperti yang direkomendasikan oleh jadwal vaksinasi nasional)

2. Jumlah kasus HIV pada perempuan, tingkat pengobatan, dan kematian (dimodifikasi Indikator MDG)

3. Jumlah kasus TB pada perempuan, prevalensi, dan tingkat kematian (Indikator MDG)

4. Tingkat kasus malaria pada perempuan, prevalensi dan tingkat kematian (Indikator MDG)

5. Jumlah kasus diare pada balita di fasilitas kesehatan

6. Persentase anak 1 tahun yang diimunisasi campak (Indikator MDG)

7. Persentase perempuan dan laki-laki berusia 15-49 yang berstatus ODHA

8. Persentase Ibu Hamil Positif HIV yang menerima PMTCT

9. Tingkat penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi (Indikator MDG)

10. Persentase kasus tuberculosis yang terdeteksi dan sembuh melalui perawatan singkat (Indikator MDG)

11. Persentase jumlah balita yang demam dan diobati dengan obat anti - malaria yang tepat (Indikator MDG)

12. Persentase penggunaan kelambu pada daerah endemis malaria (Indikator MDG)

13. Persentase kasus malaria yang menerima terapi antimalaria sesuai dengan kebijakan nasional

14. Persentase dugaan kasus malaria yang menerima tes parasitologi

15. Persentase ibu hamil yang menerima malaria IPT (di daerah endemis)

16. Tingkat kesembuhan penyakit tropis lainnya

17. Jumlah kasus dan kematian akibat Hepatitis

18. Kebijakan Negara melindungi perempuan dari HIV/AIDS dengan meningkatkan partisipasi VCT yang tidak dipaksakan, akses ARV dan kondom yang mudah dan tidak dipungut biaya

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan

1. Probabilitas kematian antara usia 30-70 karena penyakit jantung, kanker, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan bunuh diri

2. Persentase kasus kelebihan berat badan/ obesitas, termasuk balita

3. Proporsi fasilitas pelayanan bagi penderita gangguan mental berat (psikosa, gangguan afektif bipolar, atau depresi sedang/berat)

4. Persentase rumah tangga yang memiliki perokok

5. Persentase perempuan yang terdeteksi kanker serviks

6. Persentase penderita perempuan yang didiagnosis hipertensi & menerima pengobatan

7. Jumlah kasus perempuan yang menunggu elective surgery

8. Prevalensi perempuan yang tidak melakukan olahraga

9. Prevalensi perempuan (usia 18+ tahun) yang mengonsumsi kurang dari 400 gram buah dan sayuran per hari

10. Persentase perempuan yang mengonsumsi daging merah per minggu

11. Prevalensi perempuan yang mengalami diabetes (sebaiknya berdasarkan HbA1c), hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan kronis

12. Setiap Puskesmas harus ada psikolog klinis untuk menangani kasus kesehatan mental

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan yang berbahaya dari alcohol

1. Prevalensi penggunaan produk tembakau (tingkat standarisasi umur) Pelaksanaan Konvensi FCTC

2. Tingkat bahaya penggunaan alkohol

3. Prosentase perempuan yang menjadi korban dari sindikat narkoba (sebagai kurir dan pengguna)

4. Prosentase perempuan korban dampak asap rokok

5. Adanya regulasi yang memperketat peredaran dan penggunaan rokok, narkoba dan zat adiktif lainnya

3.6 Pada tahun 2020, secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas

1. Kematian perempuan akibat lalu lintas jalan per 100.000 penduduk

2. Kematian anak sekolah akibat lalu lintas jalan per 100.000 penduduk

3. Adanya Pergub mengurangi angka kematian lalu lintas global

4. Adanya KOTA RAMAH ANAK (aman dari kekerasan, aman dari diskriminasi, lalu lintas)

5. Adanya sistem (kartu sakti) bagi anak sekolah untuk dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan transportasi

3.7 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional

1. Persentase perempuan yang menjadi peserta BPJS (mandiri dan penerima bantuan/subsidi pemerintah)
2. Total Fertility Rate (TFR)
3. Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (Indikator MDG)
4. Prosentase Pemenuhan unmet need (kontrasepsi) persentase kebutuhan kontrasepsi yang terpenuhi
5. Adolescent Birth Rate (Tingkat Kelahiran pada Remaja) (Indikator MDG)
6. Persentase anak muda yang menerima pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif di tingkat SD, SMP dan SMA
7. Persentase perempuan yang bisa akses ke obat-obatan penting (daftar WHO) dengan harga terjangkau secara berkelanjutan
8. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan baru dibangun sesuai standar global (konvensi internasional) yang ramah terhadap kelompok difabel, lansia, dan lain-lain
9. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah perempuan (ortopedi, bidan perawat, perawat, kegawatdaruratan, kebidanan dan pengasuh)
10. Rasio obgyn perempuan terhadap jumlah perempuan yang mengakses layanan kesehatan reproduksi
11. Rasio petugas kesehatan terhadap jumlah perempuan yang mengakses layanan kesehatan reproduksi
12. Adanya mekanisme layanan kesehatan yg aksesible dan proaktif melayani perempuan berkebutuhan khusus dan perempuan yang tinggal di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, terisolir secara demografis

3.8 Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua

13. Zero tolerance praktik-praktik yang berbahaya terhadap kesehatan reproduksi perempuan termasuk sunat perempuan

1. Persen anak-anak menerima imunisasi lengkap (seperti yang direkomendasikan oleh jadwal vaksinasi nasional)
2. Usia harapan hidup sehat pada saat lahir
3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima pasien BPJS
4. Persentase perempuan yang bisa akses ke obat-obatan esensial dengan harga terjangkau secara berkelanjutan
5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang baru dibangun sesuai dengan kode bangunan dan standar
6. Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk (orthopaedi, ahli kebidanan, perawat, petugas kesehatan masyarakat, kegawatdaruratan)
7. Adanya JKN dan pelayanan berkualitas bagi semua tanpa diskriminasi
8. Adanya Perda-Perda (Provinsi, Kabupaten/Kota) tentang akses universal layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan pendidikan kespro
9. Non discrimination rights based and health service
10. Persentase anak muda yang menerima pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif (anak muda usia 15-24 tahun)
11. Adanya Perda bagi Ibu Hamil HIV + yang memberikan caesarian dan ARV gratis
12. Adanya pelayanan kesehatan yang sensitive terhadap kebutuhan perempuan dan non-diskriminasi

3.9 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah

1. Persentase perempuan yang terpapar pada penyakit dan kematian akibat polusi dan terkontaminasi bahan kimia pada udara, air dan tanah

3.a Menguatkan implementasi dari Kerangka Kerja Konvensi WHO mengenai Kontrol terhadap Tembakau di semua negara, sebagaimana layaknya

1. Prosentase penduduk yang menggunakan produk tembakau
 2. Adanya Perda yang melarang untuk merokok di area publik
 3. Ratifikasi/aksesi FCTC dan membuat regulasi yang ketat untuk melindungi hak perempuan untuk sehat

3.b Mendukung riset dan pengembangan dari vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular, yang secara khusus mempengaruhi negara-negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat-obatan dasar dan vaksin yang terjangkau, sesuai dengan Deklarasi Doha mengenai Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Publik, yang menegaskan hak dari negara-negara berkembang untuk menggunakan secara penuh provisi dalam Perjanjian Aspek Terkait Perdagangan Hak Properti Intelektual mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan publik, dan terutama akses terhadap obat-obatan untuk semua

1. Peningkatan alokasi pendanaan untuk penelitian (R &D) dan pemberian hak paten kepada penemuan-penemuan obat-obatan dan vaksin bagi perempuan yang harganya terjangkau oleh masyarakat (termasuk didalamnya ARV, vaksin anti kanker leher rahim, dll)
 2. Peningkatan alokasi ...% dari PDB untuk mensubsidi obat-obatan esensial

3.c Secara substansial meningkatkan pendanaan dan untuk perekrutan, pengembangan, training dan daya serap tenaga kerja kesehatan di negara-negara berkembang, terutama di negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil

1. Peningkatan alokasi ..% dari PDB untuk rekrutmen, Pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kerja perempuan di sektor kesehatan
2. Jumlah perempuan penerima subsidi pelayanan kesehatan reproduksi
3. Jumlah bantuan filantropi yang mendukung sektor kesehatan perempuan

3.d Menguatkan kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global

1. Jumlah pendapatan dalam negeri yang dialokasikan khususnya untuk riset dan pengembangan (R&D) terhadap kesehatan perempuan
2. Jumlah bantuan filantropi yang dialokasikan khususnya untuk riset dan pengembangan (R&D) terhadap kesehatan perempuan

Gol 4 :

Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua

TARGET

4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif

INDIKATOR

1. Persentase anak perempuan yang melek huruf
2. Persentase anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan dasar
3. Persentase anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah
4. Jumlah anak perempuan yang DO/ Putus sekolah dari SD sampai SMA
5. Jumlah perempuan yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C

6. Peningkatan program pendidikan untuk pendamping kota inklusi, penyediaan guru-guru pelatih pendamping untuk kelompok disabilitas

4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar

1. Jumlah sekolah dan tenaga pengajar inklusif
2. Jumlah anak perempuan yang sudah mengikuti PAUD
3. Persentase Anak Berkebutuhan Khusus dan difabel perempuan yang mengakses PAUD
4. Rasio tenaga pendidik terhadap murid

4.3 Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas

1. Persentase partisipasi di tingkat tersier pendidikan teknik bagi perempuan dan laki-laki
2. Persentase penerima beasiswa untuk perempuan dan laki-laki ditingkat akademi dan universitas (pendidikan tinggi)

4.4 Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha

1. Persentase perempuan dan laki-laki yang berhasil mendapatkan nilai tinggi dalam Matematika dan Bahasa /di tingkat SMP
2. Persentase perempuan dan laki-laki yang tamat SMA
3. Persentase perempuan dan laki-laki (usia 15-24 tahun) yang melek huruf
4. Persentase perempuan dan laki-laki yang menguasai Informasi Teknologi (IT)

4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk

1. Persentase anak (35-59 bulan) yang mengikuti PAUD
2. Persentase anak (perempuan dan laki-laki) yang lulus SD
3. Persentase anak (perempuan dan laki-laki) yang lulus SMP

yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan

4. Persentase anak (perempuan dan laki-laki) yang lulus SMA
5. Persentase anak yang Drop Out (DO)
6. Persentase dari orang muda (18-24 tahun) yg memiliki akses pada Paket A, B, dan C
7. Adanya perlindungan hukum yg memberikan jaminan pemenuhan hak untuk pendidikan bagi semua anak usia dini, tingkat dasar, menengah dan menjamin mereka tidak menjadi pekerja anak
8. Adanya program-program edukasi yang membangun kapasitas significant others bagi kelompok disabilitas

4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung

1. Persentase anak (perempuan dan laki-laki) yang lulus SD
2. Persentase anak (perempuan dan laki-laki) yang lulus SMP
3. Persentase anak (perempuan dan laki-laki) yang lulus SMA
4. Persentase perempuan dan laki-laki (usia 15-24 tahun) yang melek huruf
5. Adanya beasiswa khusus untuk anak perempuan
6. Pendidikan bagi semua dimanapun (khususnya anak lapas, anak jalanan, dll): pendidikan kesetaraan dan keaksaraan bagi perempuan, laki-laki serta kelompok difabel
7. Adanya kelonggaran dalam usia bagi penyandang difabel untuk proses beasiswa

4.7 Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang

1. Persentase perempuan dan laki-laki yang berhasil mendapatkan nilai tinggi dalam Matematika dan Bahasa /di tingkat SMP
2. Persentase perempuan dan laki-laki yang tamat SMA

berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan

3. Adanya kurikulum bagi pendidik yang komprehensif berisikan ttg kelompok difabel, pendidikan kebangsaan dan pendidikan HAM berperspektif gender integrasi dalam kurikulum dan pendidikan nasional, baik formal dan informal, serta pendidikan bagi aparat penegak hukum dan aparat penyelenggara Negara

4. Adanya kurikulum pendidikan seksualitas yang komprehensif, pendidikan kebangsaan dan pendidikan HAM berperspektif gender integrasi dalam kurikulum dan pendidikan nasional, baik formal dan informal, serta pendidikan bagi aparat penegak hukum dan aparat penyelenggara Negara

4.a Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

1. Persentase layanan pendidikan yang menyediakan lingkungan yang mendukung untuk belajar

2. Persentase sekolah tingkat SD dan SMP yang menyediakan air minum, sanitasi yang sehat dan layanan sehat lainnya di tingkat SD dan SMP

3. Adanya fasilitas pendidikan yang inklusi (difabel, marginal)

4.b Pada 2020, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkemabng kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya

1. Persentase jumlah beasiswa dari luar negeri (terutama Negara berkembang)

2. Adanya beasiswa bagi perempuan dan kelompok difabel dan affirmative action

4.c Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil

1. Persentase jumlah tenaga pengajar yang telah bersertifikasi
2. Persentase jumlah pertukaran tenaga pengajar ke luar negeri
3. Tingkatkan tenaga pendidik yang berkualitas dengan berbagai pelatihan-pelatihan (termasuk kerjasama internasional)

Gol 5 :

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

TARGET

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja

INDIKATOR

1. Persentase perempuan, laki-laki, masyarakat adat, dan masyarakat lokal dengan hak untuk tanah, properti, dan sumber daya alam, diukur dengan (i) persentase dengan didokumentasikan atau diakui bukti kepemilikan, dan (ii) persentase yang merasa hak-hak mereka diakui dan dilindungi
2. Persentase perempuan miskin dan perempuan rentan (korban KDRT, Pelanggaran HAM, post konflik, pengungsi, gender minoritas, dll) yang mendapatkan bantuan finansial per tahun
3. Persentase perempuan miskin dan perempuan rentan (korban KDRT, Pelanggaran HAM, post konflik, pengungsi, gender minoritas, dll) yang mendapatkan bantuan layanan kesehatan per tahun
4. Persentase perempuan dalam posisi strategis pengambil keputusan

5. Persentase jumlah perempuan professional yang remunerasinya dibedakan
6. Adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan atas Upah Layak bagi Pekerja-Pekerja Formal (termasuk outsourcing) dan Informal (termasuk PRT, Pekerja Rumahan)
7. Jumlah insiden/kejadian kekerasan domestik-publik, personal-komunal yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual
8. Zero tolerance praktek pernikahan anak serta pernikahan paksa
9. Adanya kebijakan untuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan disabilitas dan perempuan rentan lainnya

5.2 Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya

1. Persentase jumlah anak perempuan dan perempuan yg mengalami kekerasan fisik maupun seksual oleh pasangan intim (kekerasan dalam pacaran, perkawinan sirri, dan perkawinan tercatat), mantan pasangan dan anggota keluarga lainnya dan komunal (kekerasan berbasis agama, publik, dll) dlm kurun 1 tahun terakhir
2. Jumlah catatan kasus yang dilaporkan, diinvestigasi, dan diputuskan di peradilan atas kekerasan berbasis gender terhadap anak perempuan dan perempuan
3. Adanya penelitian tentang perempuan yang bebas bermobilitas dengan aman pada malam hari
4. Dicabutnya kebijakan-kebijakan diskriminatif yang memicu kekerasan terhadap perempuan
5. Adanya kebijakan pencegahan dan penanganan bagi korban perempuan di wilayah konflik dan post konflik
6. Jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh aparat, pejabat publik/negara dan otoritas Negara

5.3 Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan

7. Berkurangnya tingkat kekerasan seksual pada perempuan dan kelompok disabilitas

1. Adanya regulasi/kebijakan dan reformasi kebijakan yang menghapus praktek perkawinan anak dan sunat perempuan
2. Persentase perempuan usia 20-24 yg menikah di bawah 18 tahun
3. Persentase anak perempuan dan perempuan yg berusia 15-49 tahun yang pernah disunat
4. Menurunnya angka perkawinan usia anak bagi anak perempuan (kurang dari 18 tahun)
5. Adanya kebijakan penghapusan terhadap segala bentuk Female Genital Mutilation (FGM), termasuk sunat perempuan

5.4 Menyadari dan menghargai pelayanandan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional

1. Persentase jumlah perempuan yg unpaid di sektor formal dan informal (Ibu Rumahtangga, anak perempuan yg membantu pekerjaan org tua dalam industri rumahan)
2. Persentase perempuan yg menerima bantuan sosial dari Negara
3. Adanya penelitian jumlah jam kerja anak perempuan dan perempuan dalam sektor Pekerjaan berupah dan kerja tak berupah
4. Adanya kebijakan nasional yg memberikan tanggung jawab setara suami-istri untuk pengasuhan dan perawatan keluarga dan rumahtangga
5. Adanya kbijakan yang memastikan perlindungan (pra, transit, ditempat kerja hingga kembali) bagi buruh migran dan anggota keluarganya terutama buruh migran perempuan dan anaknya

6. Adanya regulasi/kebijakan untuk mengakui dan melindungi hak kerja bagi pekerja rumah tangga dan pekerja di sektor informal

5.5 Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik

1. Persentase perempuan dalam posisi strategis dalam mengakses, sebagai pengambil keputusan, mengontrol kebijakan dan mendapatkan manfaat di perusahaan nasional (BUMN) dan multi nasional
2. Adanya penelitian terkait jumlah perempuan yang tidak memiliki penghasilan tetap
3. Jumlah persentase perempuan yang terlibat dan menjadi mediator, negosiator, dan tenaga ahli dalam negosiasi perdamaian formal maupun informal, dan tema-tema strategis lainnya
4. Adanya mekanisme yg menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian baik dari mantan suami atau dari Negara (akses perumahan, bantuan sosial, modal dll)
5. Minimal 50% perempuan terlibat dalam politik dan pemerintahan di berbagai tingkatan
6. Minimal 50% perempuan terlibat dalam organisasi termasuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, termasuk dalam pertemuan adat
CPR

5.6 Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya

1. Persentase jumlah laki-laki yang menggunakan alat kontraseptif
2. Persentase remaja yang menerima CSE
3. Adanya kebijakan yang menjamin hak perempuan untuk mengontrol dan secara bebas bertanggung jawab terhadap seksualitasnya, termasuk bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan

5.a Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional

1. Persentase perempuan, laki-laki, masyarakat adat, dan masyarakat lokal dengan hak untuk tanah, properti, dan sumber daya alam, diukur dengan (i) persentase dengan didokumentasikan atau diakui bukti kepemilikan, dan (ii) persentase yang merasa hak-hak mereka diakui dan dilindungi
2. Persentase penduduk yang menggunakan layana perbankan (termasuk mobile banking)
3. Persentase kelompok difabel yang telah mengakses ATM

5.b Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan

1. Jumlah perempuan desa, perempuan miskin kota, adat, kepulauan, nelayan dan IRT dll yang dapat mengakses dan cakap teknologi dan informasi yg ramah dan memberdayakan perempuan
2. Jumlah ketersediaan layanan internet portable bagi perempuan setiap 100 orang/rumahtangga
3. Meningkatnya kemampuan teknologi informasi dan komunikasi juga termasuk membangun kesadaran akan potensi kekerasan seksual di bidang teknologi informasi dan komunikasi

5.c Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level

1. Persentase perempuan dalam posisi strategis dlm mengakses, sebagai pengambil keputusan, mengontrol kebijakan dan mendapatkan manfaat di perusahaan nasional (BUMN) dan multi nasional
2. Negara mencabut reservasi dalam CEDAW sebagai komitmen yang kuat untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
3. Penigkatan alokasi sumber daya (manusia dan financial) sebesar 5% dari anggaran Negara bagi women

national machineries, termasuk Komnas Perempuan sebagai NHRI (National Human Right Institution)

Gol 6 :

Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua

TARGET

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan

INDIKATOR

1. Persentase jumlah perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga yang mendapatkan akses air bersih dengan standard kesehatan
2. Lamanya waktu yang dipakai oleh perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan air (khususnya daerah rural, pegunungan dll)
3. Proporsi total sumber-sumber air yang digunakan
4. Ketersediaan air minum dan sanitasi berstandard kesehatan dan ramah perempuan di sekolah-sekolah
5. Ketersediaan air minum dan sanitasi berstandard kesehatan di rumah sakit, klinik-klinik kesehatan, puskesmas yang ramah perempuan

1. Presentase jumlah keluarga yang memiliki dan tidak memiliki sistem

kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan

sanitasi yang sehat

2. Presentase jumlah keluarga di kota dan desa yang menggunakan WC sehat
3. Ketersediaan toilet umum yang ramah perempuan, anak, dan disabilitas dan memenuhi standard kesehatan
4. Jumlah penyuluhan ke warga tentang budaya toilet yang sehat

6.3 Pada tahun 2030, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global

1. Adanya subsidi dari pemerintah untuk integrasikan teknologi pengelolaan air limbah rumah tangga yang ramah perempuan
2. Persentase jumlah perempuan dan laki-laki yang mengalami gangguan kesehatan (reproduksi) karena dampak oleh limbah industri
3. Presentase jumlah industri atau perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan air limbah aman

6.4 Pada tahun 2030, secara substantif meningkatkan penggunaan air secara efisien di semua sektor dan memastikan pengambilan dan suplai air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air

1. rorporasi penggunaan air secara adil antara industri dengan masyarakat yang hidup disekitar industri
2. Jumlah revisi kebijakan yang terkait dengan penggunaan air industri ekstraktif, hotel, mal, apartemen dll
3. Proporsi penggunaan air untuk kebutuhan irigasi pertanian yang ramah terhadap perempuan
4. Proporsi total sumber air yang dgunakan (Indiaktor MDGs)

6.5 Pada tahun 2030, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi (IWRM) pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selayaknya

1. Persentase industri yang memiliki perencanaan pengelolaan air limbah yang ramah kesehatan perempuan
2. Persentase jumlah industri yang memiliki sistem pengelolaan limbah standard internasional yang ramah perempuan

6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan memperbaiki ekosistemterkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, resapan air dan danau

1. Adanya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan seperti ilegal logging, pembakaran hutan, intensifikasi lahan
2. Tersediaan kebijakan (RUU) pengelolaan hutan rakyat yang sensitif gender
3. Terintegrasinya pengetahuan lokal perempuan terhadap pengelolaan ekosistem air kedalam kebijakan tata kelolah air

6.a Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas kepada negara-negara berkembang dalam aktivitas dan program terkait air dan sanitasi, termasuk water harvesting, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan ulang

1. Jumlah kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi pengelolaan air dan limbah yang ramah pada perempuan
2. Persentase alokasi budget negara untuk inovasi teknologi pengelolaan air berperspektif gender

6.b Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi

1. Jumlah inovasi-inovasi terkait dengan air dan sanitasi yang berbasis pada pengetahuan perempuan dan orang lokal
2. Jumlah keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan atas akses dan kontrol terhadap air

6.a Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas kepada negara-negara berkembang dalam aktivitas dan program terkait air dan sanitasi, termasuk water harvesting, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan ulang

1. Jumlah penggunaan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri
2. Persentase perempuan dan perempuan kepala keluarga yang tidak dapat mengakses listrik
3. Persentasi jumlah rumah tangga yang menggunaakn teknologi memasak dan bersih-bersih rumah yang sehat dan murah (gas atau listrik),jaminan ketersediaan dan berkelanjutan
4. Persentase peningkatan subsidi negara

untuk mengintegrasikan teknologi energi terbarukan dalam rumah tangga

Gol 7 :

Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua

TARGET

7.1 Pada tahun 2030, memastikan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern

7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substantif proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global
7.3 Pada

INDIKATOR

1. Adanya kebijakan perbankan untuk mendukung inovasi energi terbarukan yang berperspektif gender dengan bunga rendah
2. Persentase jumlah perempuan peneliti yang dapat mengakses dana bank untuk inovasi energi terbarukan
3. Adanya peningkatan subsidi bantuan dana untuk inovasi energi terbarukan pada lembaga riset, termasuk lembaga riset perempuan
4. Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan alat-alat masak dan bersih-bersih modern yang sehat, murah dan ramah lingkungan sehingga perempuan punya waktu belajar dan bersosialisasi

1. Index tahunan penggunaan energi terbarukan berperspektif gender
2. Persentase jumlah penggunaan kendaraan dengan bahan bakar

tahun 2030, menggandakan laju perbaikaneffisiensi energi

berbasis energi terbarukan dan ramah perempuan

3. Adanya kebijakan subsidi perumahan dengan menggunakan energi terbarukan

7.a Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih, dan mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih

1. Persentase jumlah pameran inovasi
53. Rate of primary energy intensity improvement

7.b Pada tahun 2030, menambah infrastruktur dan meningkatkan mutu teknologi untuk supply pelayanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan bantuan program masing-masing

1. Jumlah kerjasama dengan komunitas internasional untuk pengembangan teknologi energi terbarukan berperspektif gender
2. Persentase penyerapan tenaga kerja dan ahli lokal, untuk mengembangkan riset energi terbarukan dimana quota 30% untuk perempuan dipenuhi

Gol 8 :

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua

TARGET

8.1 Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan

INDIKATOR

Ukuran kerja rata-rata kemiskinan di \$2 PPP perkapita setiap hari (Working

situasi nasional dan, khususnya, setidaknya mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara kurang berkembang

poverty rate measured at \$2 PPP per capita per day).

8.2 Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi, peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya

1. Index on ICT maturity
2. Persentase Nilai tambah manufaktur bagi perempuan di GDP
3. Jumlah pekerja perempuan di R&D (perjuta penduduk)
4. Jumlah pekerja yang bekerja pada industri

8.3 Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan

1. Jumlah pekerja muda perempuan di sektor formal dan non formal
 2. Jumlah Ratifikasi dan implementasi standar-standar dasar ILO yang berkaitan dengan hak-hak buruh perempuan
 3. Jumlah perempuan yang menggunakan jasa perbankan (termasuk mobile banking)
 4. Jumlah kerja layak bagi perempuan
 5. Jumlah pendapatan rumah tangga perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga
 6. Household income, including in-kind services (PPP, current US\$)
- Proporsi total penggunaan sumber daya air bagi perempuan

8.4 Memperbaiki secara progresif, sampai tahun 2030, efisiensi sumberdaya global dalam hal konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun

1. Jumlah pekerja muda perempuan di sektor formal dan non formal
2. Jumlah Ratifikasi dan implementasi standar-standar dasar ILO yang berkaitan dengan hak-hak buruh perempuan

program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara- negara maju

3. Gender Gap Upah berdasarkan aktivitas sektor ekonomi

4. Employment to population ratio – EPR by gender and age group (15-64) (Pekerjaan untuk rasio penduduk

5. Berbagi kerja informal perempuan dalam total kerja

6. Persentase kepemilikan rekening perempuan dan kontribusi pekerja keluarga (perempuan) di total kerja

7. Peningkatan jumlah perempuan yang mendapat kesempatan dan upah yang sama untuk jenis pekerjaan sama, khususnya kelompok disabilitas sesuai dengan konvensi disabilitas

8.5 Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama

1. Secondary completion rates for girls and boys

2. Tertiary enrollment rates for women and men

3. Angka pekerja muda perempuan di sektor formal dan informal

4. Meningkatnya jumlah kaum muda perempuan yang mendapat pekerjaan, pendidikan atau training

8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan atau

1. Persentase pekerja anak di kota dan desa

2. Adanya penegakan hukum penghapusan pekerja anak

3. Jumlah Ratifikasi dan implementasi standar-standar dasar ILO

4. Pemenuhan rekomendasi dari Universal Periodic Review and UN Treaties

8.7 Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan

1. Ratifikasi dan implementasi konvensi ILO 189 tentang PRT

2. Persentase penerapan protokol Palermo dan Konvensi Migran 1990 dalam kasus trafficking

menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan pemanfaatan serdadu anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak

3. Persentase kasus pelanggaran hak-hak buruh perempuan

4. Persentase jumlah perempuan dan anak perempuan yang bekerja dalam situasi berbahaya/rentan

5. Persentase kasus pelanggaran hak termasuk buruh migran perempuan sesuai dengan rekomendasi umum Komite CEDAW nomor 26.

6. Jumlah Ratifikasi dan implementasi standar-standar dasar ILO

7. Keberadaan dan pelaksanaan Pemenuhan rekomendasi dari Universal Periodic Review and UN Treaties

8.8 Mellindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting

1. Adanya kebijakan yang menjamin akses pariwisata yang tidak melanggar HAM perempuan dan anak serta berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat terutama perempuan

2. Persentase peningkatan akses pariwisata yang tidak melanggar HAM Perempuan dan Anak

3. Persentase peningkatan akses pariwisata yang menjamin peningkatan pendapatan masyarakat setempat terutama perempuan

8.9 Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal

1. Keberadaan dan pelaksanaan kebijakan perbankan untuk menurunkan tingkat suku bunga perbankan khususnya untuk usaha kecil dan menengah bagi perempuan

2. Jumlah dan kualitas pertumbuhan lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat, misalnya Koperasi bagi perempuan.

3. Jumlah perempuan yang menggunakan jasa perbankan (termasuk mobile banking)

4. Adanya kebijakan yang menunjang dan memperluas akses perempuan pada perbankan, asuransi dan layanan keuangan.

8.10 Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua

Jumlah Ratifikasi dan implementasi standar-standar dasar ILO

Angka pekerja muda perempuan (19-24 tahun) di sektor formal dan informal

8.a Meningkatkan Bantuan untuk Perdagangan (Aid for Trade) untuk negara-negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Kerja Terintegrasi yang Diperluas untuk Bantuan Teknis Terkait Perdagangan bagi Negara-negara Kurang Berkembang

2. Lamanya waktu yang dipakai oleh perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan air (khususnya daerah rural, pegunungan dll)

3. Proporsi total sumber-sumber air yang digunakan

4. Ketersediaan air minum dan sanitasi berstandar kesehatan dan ramah perempuan di sekolah-sekolah

5. Ketersediaan air minum dan sanitasi berstandar kesehatan di rumah sakit, klinik-klinik kesehatan, puskesmas yang ramah perempuan

8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global bagi angkatan kerja muda dan mengimplementasikan Pakta Kerja Global milik Organisasi Buruh Internasional (ILO)

1. Presentase jumlah keluarga yang memiliki dan tidak memiliki sistem

Gol 9 :

Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi

TARGET

9.1 Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua

9.2 Mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan, pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan bagian industri terhadap penciptaan lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan situasi nasional, dan menggandakan bagian industri di negara kurang berkembang

9.3 Meningkatkan akses industri skala kecil dan usahak skala kecil lainnya, khususnya di negara-negara berkembang terhadap layanan pendanaan, termasuk

INDIKATOR

1. Persentase akses jalan dan transportasi yang aman dan ramah terhadap perempuan, termasuk bebas kekerasan seksual
2. Persentase perempuan menggunakan layanan manajemen air yang aman
3. Persentase perempuan menggunakan layanan dasar sanitasi
4. Jumlah perempuan yang menggunakan alat masak modern di desa/kota
5. Index of ICT Maturity
6. Persentase rumah tangga dimana perempuan menggunakan akses internet di desa/kota

1. Adanya Nilai tambah manufaktur bagi perempuan seperti di persentase GDP
2. Persentase perempuan usia kerja yang bekerja di industri
3. Persentase perempuan dalam berbagai tingkatan kerja di industry

1. Persentase peningkatan kredit usaha kecil untuk perempuan yang menjamin perlindungan dan keberlanjutan usaha;
2. Ketersediaan dukungan untuk

kredit yang terjangkau dan digabungkan dengan value chains dan pasar

peningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan usaha mikro

3. Jumlah perempuan yang menggunakan jasa perbankan (termasuk mobile banking)

9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan mutu infrastruktur dan menambahkan komponen pada industri agar dapat berkelanjutan, dengan ditambahkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengadopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan dan proses industrial, dimana semua negara melakukan aksi ini disesuaikan dengan

1. Persentase rumah tangga yang mengelola sampahnya yang ramah lingkungan

2. Jumlah masyarakat terutama perempuan dan anak yang terkena dampak negative limbah industri khususnya terhadap kesehatan reproduksi

9.5 Menambah penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substantif meningkatkan jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan juga riset publik dan swasta serta pengeluaran pembangunan

1. Keberadaan dan pelaksanaan pemberian dukungan penelitian untuk peningkatan di sektor industri

2. Peningkatan jumlah peneliti perempuan di bidang teknologi industri mulai dari asisten peneliti sampai ahli peneliti utama.

9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan berkelanjutan di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi dan teknis yang diperbanyak untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkungkung daratan dan negara berkembang kepulauan kecil

1. Jumlah bantuan (dana) untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh khususnya di pulau terluar dan perbatasan

2. Meningkatnya jumlah bantuan infrastruktur dasar (seperti rumah,sekolah, jalan, pasar,shelter untuk korban kekerasan,fasilitas kesehatan,pendidikan)

3. Berfungsinya institusi pemerintah setempat.

9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan kondisi kebijakan yang kondusif untuk, diantaranya, diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditi

1. Jumlah dukungan teknologi domestik yang ramah dan aman bagi perempuan.
2. Jumlah penelitian berperspektif gender
3. Jumlah peneliti dan teknolog perempuan di semua bidang dan semua tingkatan
4. Meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam diversifikasi industri dan nilai tambah bagi komoditi

9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan berupaya untuk menyediakan akses yang universal dan terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020

1. Adanya kebijakan berperspektif gender untuk meningkatkan akses masyarakat pada informasi, komunikasi dan teknologi.
2. Adanya program peningkatan kapasitas penciptaan teknologi, informasi dan komunikasi yang mudah digunakan (user friendly).
3. Meningkatnya pemanfaatan TI dan Komunikasi untuk pelaksanaan e-government dan layanan kepada masyarakat terutama perempuan
4. Persentase jumlah peningkatnya peran, kapasitas dan ketrampilan perempuan dalam memanfaatkan TI dan Komunikasi
5. Jaminan perlindungan pada pemanfaatan TI dan Komunikasi pada perempuan dan anak
6. Index on ICT maturity

Gol 10 : Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara

TARGET

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional

10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya

10.3 Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan/

INDIKATOR

1. Jumlah KK Perempuan yg memiliki pendapatan lebih rendah dibawah 50% dari median income di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota
2. Adanya upah dan pajak yang sama antar laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama

1. Persentase perempuan, laki-laki, masyarakat adat, dan masyarakat lokal dengan hak untuk tanah, properti, dan sumber daya alam, diukur dengan (i) persentase dengan didokumentasikan atau diakui bukti kepemilikan, dan (ii) persentase yang merasa hak-hak mereka diakui dan dilindungi
2. Persentase perempuan dalam posisi strategis dlm mengakses, sebagai pengambil keputusan, mengontrol kebijakan dan mendapatkan manfaat di perusahaan nasional (BUMN) dan multi nasional
3. Adanya ratifikasi dan implementasi sesuai Konvensi ILO ttg Perburuhan termasuk ILO 189 ttg Kerja Layak PRT,
4. Rekomendasi UPR dan traktat-traktat PBB

1. Adanya regulasi maupun kebijakan dan reformasi kebijakan untuk menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif antara

outcome, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini

lain : menghapus kebijakan-kebijakan adminduk, PNPS no 1, UU perkawinan yang diskriminatif, Perda-Perda diskriminatif atas nama agama dan moralitas

2. Adanya penegakan hukum untuk pemenuhan hak keadilan bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi

3. Adanya perubahan sikap dan perspektif para pengambil kebijakan, pejabat dan tokoh publik untuk tidak mendiskriminasi perempuan dan kelompok-kelompok tertentu berbasis identitas gender dan seksual, agama, keyakinan, ras, kelas, etnis, status kesehatan, dll

4. Penguatan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai NHRI yang bermandat spesifik pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan

10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan

1. Persentase jumlah penduduk mendapat jaminan sosial (termasuk didalamnya kesehatan, ekonomi dan pendidikan)

2. Adanya ratifikasi dan implementasi sesuai Konvensi ILO ttg Perburuhan termasuk ILO 189 ttg Kerja Layak PRT,

3. Rekomendasi UPR dan traktat-traktat PBB

4. Regulasi/kebijakan yang memberikan jaminan nasional bagi perempuan paska perceraian, perempuan kepala rumah tangga dan keluarganya dan perempuan yang tidak menikah

10.5 Memperbaiki regulasi dan memonitor pasar dan institusi keuangan global dan menguatkan implementasi dari regulasi tersebut

1. Adanya laporan tahunan dari pihak perbankan global Bank for International Settlements (BIS), International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting

Standards (IFRS), International Monetary Fund (IMF), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Trade Organization (WTO) dalam kaitannya dengan aturan internasional perbankan dan pencapaian target SDGs

10.6 Memastikan representasi yang lebih banyak dan suara untuk negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di institusi-institusi ekonomi dan keuangan global internasional agar dapat menjadi institusi yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan sah

1. Adanya laporan tahunan dari pihak perbankan global Bank for International Settlements (BIS), International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Standards (IFRS), International Monetary Fund (IMF), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Trade Organization (WTO) dalam kaitannya dengan aturan internasional perbankan dan pencapaian target SDGs
2. Adanya perwakilan perempuan dan suara perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga ekonomi internasional

10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik

1. Jumlah pengungsi per tahun
2. Adanya laporan tahunan dari pihak perbankan global Bank for International Settlements (BIS), International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Standards (IFRS), International Monetary Fund (IMF), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Trade Organization (WTO) dalam kaitannya dengan aturan internasional perbankan dan pencapaian target SDGs
3. Adanya regulasi dan kebijakan yg memastikan perempuan yang bermigrasi, termasuk stateless person, pengungsi (termasuk yang di dalam negeri) serta pencari suaka bebas dari diskriminasi, kekerasan, terutama kekerasan seksual

10.a Mengimplementasikan prinsip perlakuan khusus dan diferensial untuk negara-negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, sesuai dengan perjanjian WTO

1. Adanya laporan tahunan dari pihak perbankan global Bank for International Settlements (BIS), International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Standards (IFRS), International Monetary Fund (IMF), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Trade Organization (WTO) dalam kaitannya dengan aturan internasional perbankan dan pencapaian target SDGs

10.b Mendorong bantuan pembangunan resmi (ODA) dan aliran finansial, termasuk investasi asing langsung (FDI), untuk negar-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang kepulauan kecil dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional masing-masing

1. Berkurangnya utang luar negeri pemerintah dan adanya pengelolaan yang transparan
2. Peningkatan alokasi bantuan pembangunan resmi dan aliran keuangan tidak dalam bentuk utang

10.c Padatahun 2030, mengurangi sampai dengan kurang dari 3 persen dari biaya transaksi pengiriman migran dan menghilangkan koridor pengiriman yang berbiaya lebih dari 5 persen

Remittance transfer costs

Gol 11 :

Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan

TARGET

11.1 Pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh

11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan manula

INDIKATOR

1. Persentase jumlah perempuan kepala keluarga yang dilindungi dengan jaminan sosial
2. Persentase jumlah keluarga miskin yang menempati rumah layak subsidi pemerintah
3. Persentase perempuan dan anak yang meninggal akibat bencana karena tempat tinggal yang beresiko
4. Persentase jumlah kawasan kumuh perkotaan dan kawasan perumahan ilegal
5. Adanya sistem pengelolaan limbah air dengan menggunakan teknologi energi terbarukan

1. Adanya kebijakan pemerintah untuk perumahan ramah lingkungan dimana pengelolaan limbah air, sistem drainase dan penerangan yang cukup untuk keselamatan perempuan
2. Persentase jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan di transportasi publik
3. Persentase jumlah perumahan dan lingkungan yang menerapkan pengelolaan sampah berbasis komunitas
4. Ketersediaan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan ramah pada perempuan
5. Ketersediaan transportasi publik di daerah pedesaan

11.3 Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris, terintegrasi dan berkelanjutan di setiap negara

1. Keberadaan dan pelaksanaan kerangka kerja hunian perkotaan yang ramah lingkungan, perempuan dan disabilitas
2. Persentase jumlah kota-kota yang ramah perempuan, anak dan disabilitas
3. Keberadaan dan pelaksanaan sistem keamanan
4. Keberadaan transportasi yang murah, efektif, bersih, aman dan ramah disabilitas untuk mobilitas perempuan dalam mengakses kesehatan, pendidikan dan layanan publik yang lainnya
5. Persentase jumlah kendaraan yang memiliki pembuangan CO2 yang efisien
6. Ketersediaan sarana bermain anak di komunitas
7. Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan desain kota/ komunitas berperspektif gender

11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia

1. Persentase kota-kota yang menggunakan strategi pengurangan risiko bencana dan resiliensi sesuai dengan Hyogo framework untuk melindungi peninggalan bersejarah
2. Ketersediaan budget dari pemerintah nasional untuk melestarikan warisan budaya dan alam

11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan yang berada di situasi rentan

1. Angka kematian perempuan dan anak dalam kejadian bencana
2. Persentase kota dan desa yang melaksanakan sistem peringatan dini bencana yang ramah perempuan, anak dan disabilitas
3. Persentase jumlah perempuan kepala keluarga yang mendapatkan penggantian rumah dan kelengkapannya akibat bencana alam
4. Keberadaan dan pelaksanaan

kebijakan penanganan bencana yang efektif

11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah lainnya

1. Persentase jumlah sampah perkotaan yang dikumpulkan dan dikelola dengan menggunakan pemilahan organik dan non organik
2. Persentase sekolah-sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter pengelolaan sampah terintegrasi
3. Keberadaan dan pelaksanaan kebijakan No Plastic dan promosi produk daur ulang yang dikerjakan oleh industri kreatif (perempuan dan disabilitas) dalam negeri dengan dukungan subsidi penuh pemerintah
4. Keberadaan kerjasama antara urban dan peri urban untuk membuat sistem pengelolaan sampah terpadu

11.7 Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas

1. Persentase ruang terbuka hijau ramah perempuan, anak dan disabilitas di perkotaan yang mudah diakses dari perumahan atau komunitas
2. Keberadaan jalur pejalan kaki dan sepeda yang ramah pada perempuan hamil, disabilitas dan anak
3. Jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak di ruang publik yang mendapatkan hukuman maksimal dari pengadilan

11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif diantara area urban, peri-urban dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional

Keberadaan dan pelaksanaan planning kerjasama urban dan peri urban yang menguntungkan secara ekonomi dan meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak lebih terintegrasi

11.b Pada tahun 2020, secara substantif meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Resiko Pengurangan Bencana 2015-2030, dan manajemen resiko bencana yang holistic pada semua level

1. Jumlah keterlibatan perempuan dalam perencanaan tata kota yang berperspektif gender, ramah lingkungan dan resilien terhadap bencana

2. Persentase kota-kota yang melaksanakan kebijakan tanggap bencana yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan dan marginal

11.c Mendukung negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan finansial dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tahan lama dengan memanfaatkan bahan material lokal

1. Persentase jumlah bantuan beasiswa untuk pendidikan bagi negara miskin dengan minimal 30% quota untuk perempuan

2. Adanya kerjasama dengan negara-negara miskin untuk penguatan peran masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan dalam pembangunan

Gol 12 : Memastikan pola konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan

TARGET

12.1 Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dimana seluruh negara melakukan

INDIKATOR

1. Keberadaan Laporan pelaksanaan kerangka program konsumsi dan produksi

2. Adanya dukungan alokasi dana

aksi, dengan dipelopori negara-negara maju, dengan melihat pembangunan dan kemampuan dari negara-negara berkembang

untuk penelitian diversifikasi bibit tanamana lokal

3. Jumlah peneliti perempuan yang mendapatkan akses pendanaan untuk pengembangan bibit tanamanan lokal untuk pangan dan obat

4. Keberadaan pasar industri tanamana kreaif

12.2 Pada tahun 2030, mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam

1. Persentase lahan kosong/pekarangan di perkotaan untuk ditanami tumbuhan sayuran organik dan obat-obatan tradisional dengan dukungan pemerintah

2. Keberadaan pasar industri kreatif dan inovatif di dalam negeri yang didukung oleh pemerintah, dimana produk kreatif perempuan dan kelompok arginal akar rumput diprioritaskan

3. Index sistem ekonomi hijau belperspektif gender

12.3 Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen

1. Keberadaan dan pelaksanaan kebijakan biogas dari limbah makanan sisa di area perbelanjaan dan perumahan yang ramah pada perempuan

2. Adanya dukungan finansial pemerintah untuk pengembangan inovasi tackling limbah makanan sisa, dimana 30% kuota untuk peneliti perempuan

3. Keberadaan dan pelaksaasn kebijakan untuk restoran agar pelanggan menghabiskan makanan yang dipesan untuk mengurangi sisa makanan yang terbuang

4. National Food Lost Index belperspektif gender

12.4 Pada tahun 2020, meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya sepanjang siklus

1. Index polusi perkotaan di Indonesia dan dampaknya pada kesehatan reproduksi perempuan

hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan tersebut ke udara, air dan tanah dalam rangka meminimalisir dampak buruk bahan tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan

2. Persentase jumlah perempuan dan laki-laki yang menderita penyakit akibat polusi udara dan air.
3. Persentase tingkat kesuburan pasangan di kota dan pedesaan
4. Keberadaan dan pelaksanaan UU penggunaan energi terbarukan pada kendaraan dan mesin industri
5. Porposisi penggunaan kendaraan dengan tenaga listrik di perkotaan

12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali

1. Keberadaan laporan monitoring pelaksanaan kebijakan kontrol plastik pada produk makanan dan kantong belanja
2. Persentase sampah yang di daur ulang

12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan skala besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek yang berkelanjutan dan untuk memasukkan informasi yang berkelanjutan didalam siklus laporan mereka

1. Adanya laporan perusahaan besar dan transnasional yang menjalankan pratek berkelanjutan
2. Keberadaan dan pelaksanaan satuan tugas pengawasan aplikasi CSR pada program pemberdayaan yang sekurang-kurangnya terdapat 2 wakil perempuan dan wakil kelompok rentan dari masyarakat sipil

12.7 Mendukung praktek-praktek pengadaan barang publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional

1. Keberadaan dan pelaksanaan 10 tahun rencana program untuk konsumsi dan produksi
2. Keberadaan dan pelaksanaan pengadaan barang publik yang menintegrasikan rencana keberlanjutan dan baperspektif gender

12.8 Pada tahun 2030, memastikan bahwa setiap orang dimanapun mendapatkan informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan

1. Persentase kantor-kantor layanan publik yang telah mengintegrasikan pembangunan keberlanjutan ke dalam kebijakan dan program,
2. Keberadaan dan pelaksanaan

dan gaya hidup yang berkelanjutan secara harmonis dengan alam

pendidikan harmoni berkelanjutan (hamroni dengan alam dan manusia) di sekolah, dimana perspektif gender terintegrasi

3. Ketersediaan website pemerintah untuk memberikan update tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk menguatkan kapasitas ilmiah dan teknologi agar dapat bergerak menuju pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal

1. Persentase jumlah desa wisata yang ramah lingkungan, ramah perempuan dan anak, serta mempertimbangkan lokalitas

2. Adanya dukungan pengembangan masyarakat sebagai pelaku pariwisata berkelanjutan

3. Ketersediaan laporan pelaksanaan pariwisata berkelanjutan dengan data terpilah

4. Keberadaan dan pelaksanaan kebijakan perbankan yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, dimana kuota 30% perempuan dipakai

12.c Merasionalisasikan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang justru mendorong konsumsi berlebih dengan cara menghilangkan penyimpangan pasar, sesuai dengan situasi nasional, termasuk dengan merestrukturisasi pajak dan secara bertahap mengurangi subsidi yang berbahaya, dimana adanya, untuk merefleksikan dampaknya

1. Ketersediaan laporan monitoring pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai komitmen pengalihan subsidi BBM, dengan data terpilah gender, kota-desa dll

2. Adanya promosi nasional penggunaan kendaraan berbahan bakar energi terbarukan sebagai kampanye nasional

3. Ketersediaan supplier energi terbarukan (biofuel) yang murah, dapat diakses untuk

terhadap lingkungan, dengan melihat pada kebutuhan spesifik dan kondisi dari negara-negara berkembang dan meminimalisir dampak buruk terhadap pembangunan negara-negara tersebut dengan cara yang

Gol 13 : Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

TARGET

13.1 Memperkuat daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara

13.2 Mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional

13.3 Memperbaiki pendidikan, kesadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan

INDIKATOR

1. Adanya kebijakan yang terkait dengan pengurangan resiko bencana akibat dampak dari perubahan iklim terhadap perempuan dan anak perempuan

1. Adanya program peningkatan kapasitas bagi perempuan agar dapat menghadapi perubahan iklim secara aktif
2. Terintegrasinya perspektif gender dalam perencanaan, strategi, dan kebijakan nasional tentang perubahan iklim

1. Keberadaan informasi tentang perubahan iklim dan dampaknya pada perempuan dan anak terintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah

iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini

2. Jumlah simulasi peringatan dini di sekolah-sekolah

3. Jumlah penyuluhan-penyuluhan terkait dengan perubahan iklim di sekolah dan masyarakat sekitar sekolah

13.a Mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh pihak negara-negara maju kepada Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim dengan tujuan untuk memobilisasikan secara bersama \$100 milyar pertahunnya pada tahun 2020 dari segala sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi dan transparansi terhadap implementasinya dan secara penuh mengoperasionalkan Dana Iklim Hijau (GCF) melalui kapitalisasi secepat mungkin

1. Ketersediaan hasil monitoring pelaksanaan Kerangka Kerja Konvensi PBB terhadap perubahan iklim, dengan data segregasi gender, pulau2 kecil,

2. Keberadaan dan pelaksanaan Trust fund untuk perubahan iklim, dimana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan kuota 30% untuk lembaga perempuan sebagai penerima manfaat

13.b Mendukung mekanisme untuk peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, dengan berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan marjinal

1. Jumlah staf perempuan senior yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan kebijakan dan program perubahan iklim

2. Persentase jumlah perempuan yang duduk di SKPD terkait langsung dengan perubahan iklim

Gol 14 :

Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan

TARGET

14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi kelautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa barang laut dan dan polusi bahan makanan

14.2 Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif

INDIKATOR

1. Jumlah efisiensi penggunaan nitrogen untuk sistem makanan
2. Jumlah Keterwakilan perempuan dalam proses penentuan kebijakan pengelolaan sampah di daerah pesisir dan laut
3. Keberadaan dan pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan hutan mangrove oleh komunitas, dengan memastikan peran penting perempuan dalam menjaga sumber kehidupan
4. Ketersediaan tempat pengelolaan sampah terpadu dengan menggunakan teknologi energi terbarukan dan ramah perempuan

1. Persentase ...% pembangunan wilayah pesisir dan laut dengan perencanaan ICM/MSP yang telah formulisasikan dan terlaksanakan berdasarkan pendekatan ekosisten yang membangun ketahanan komunitas dan ekosistem, serta menyediakan sharing keuntungan dan pekerjaan layak
2. Jumlah perempuan yang terlibat dalam jajaran pengambil keputusan senior
3. Jumlah Perempuan mendapatkan akses bantuan modal untuk pengembangan produk makanan hasil laut

14.3 Meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut, termasuk memperbanyak kerjasama ilmiah pada setiap evel

1. Ketersediaan laporan monitoring tingkat keasaman air laut
2. Index Nasional Aksi Perubahan Iklim

14.4 Pada tahun 2020, secara efektif meregulasi panen dan pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teregulasi, juga praktek-praktek pemancingan yang destruktif serta mengimplementasikan perencanaan manajemen berbasis ilmiah agar dapat mengembalikan persediaan ikan secepat mungkin, setidaknya padalevel dimana dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sebagaimana karakteristik biologis masing-masing ikan

1. Ketersediaan stok ikan yang cukup
2. Keberadaan dan pelaksanan kebijakan pengelolaan produk-produk laut
3. Ketersediaan dukungan finansial kepada lembaga-lembaga riset untuk mengembalikan persediaan ikan
4. Jumlah peneliti perempuan yang menerima bantuan dana penelitian untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pembibitan ikan
5. Jumlah bantuan inovasi pengembangan produk-produk kelautan, minimal 30% bantuan masuk ke kelompok perempuan
6. Keberadaan dan pelaksanaan kebijakan pasar produk-produk kelautan yang berpihak pada industri kecil di desa, dimana perempuan banyak mendominasi

14.5 Pada tahun 2020, mengkonservasi setidaknya 10 persen dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia

1. Keberadaan dan pelaksanaan kebijakan konservasi 10% wilayah pesisir laut

14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kapasitas berlebih dan pengambilan ikan yang berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak

1. Persentase income negara terhadap hasil-hasil kelautan setiap tahun
2. Keberadaan

teregulasi dan menahan diri dari memperkenalkan bentuk subsidi yang demikian, dengan kesadaran bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang layak dan efektif untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi WTO²

14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, budidaya pariwisata perairan

14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset dan transfer teknologi kelautan, dengan melihat pada Kriteria dan Panduan Komisi Antar Pemerintah Oceanografi mengenai Transfer Teknologi Kelautan, agar dapat meningkatkan kesehatan laut dan memperbanyak kontribusi keaneka ragam hayati laut terhadap pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang

14.b Menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil

1.% GDP dari sektor perikanan
2. Persentase pendapatan nelayan perempuan dan laki-laki dari segala bentuk sektor perikanan

1. Ketersediaan berbagai kompetisi penelitian dan karya ilmiah untuk mendorong pada inovasi teknologi untuk mengembangkan perlindungan pesisir dan laut
2. Ketersediaan dukungan penuh pada SMK kelautan termasuk laboratorium dan teknologi terkait sebagai alat belajar

1. Presentase perempuan nelayan yang mendapatkan keterampilan pengolahan dan pemasaran produk-produk hasil laut

2. Ketersediaan pasar tradisional yang layak dengan memenuhi standard kesehatan dengan sistem pengelolaan limbah terpadu, ramah perempuan dan disabilitas, terakses oleh nelayan
3. Jumlah peneliti perempuan yang mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan inovasi makanan olahan hasil laut
4. Ketersediaan pasar industri kreatif yang berpihak pada masyarakat, yang bisa mendongkrak kehidupan perempuan nelayan

14.c Memperbanyak konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap laut dan sumber dayanya, seperti yang tertera di paragraf 158 dari “The Future We Want” (Masa Depan yang Kami Inginkan)

Gol 15 :

Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati

TARGET

15.c Meningkatkan dukungan global untuk memerangi pelanggaran dan trafiking dari jenis yang dilindungi, termasuk

INDIKATOR

1. Adanya kebijakan yang mengakui keberadaan masyarakat adat dengan seluruh tata nilainya, serta memulihkan hak perempuan ADAT atas pangan,

dengan meningkatkan kemampuan masyarakat local untuk menuntut kesempatan hidup berkelanjutan

lingkungan hidup berkelanjutan, air bersih, tanah adat, relasi social yang hilang, hak atas spiritual dan ritual adat.

2. Adanya kebijakan Negara yang melindungi hak perempuan adat dari eksploitasi perusahaan, termasuk tidak mengkriminalkan mereka.

3. Adanya kebijakan Negara yang mengatur sanksi tegas dengan efek penjara terhadap perusahaan yang melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan.

Gol 16 :
Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inclusive di semua level

TARGET

16.1 Secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan penyiakaan terhadap anak

INDIKATOR

1. Adanya kebijakan yang memastikan situasi yang damai dan bebas dari kekerasan terutama kekerasan seksual bagi perempuan termasuk perempuan pengungsi, stateless, dan pencari suaka.

2. Adanya kebijakan untuk penanganan pengungsi, utamanya perempuan yang sesuai standar kovenan sipil-politik, dan kovenan EKOSOB.

3. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan berbagai angka kematian terkait secara signifikan.

16.2 Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiiksaan terhadap

1. Adanya kebijakan untuk menghentikan segala bentuk penyiiksaan, eksploitasi, perdagangan dan kekerasan terhadap anak, perempuan, dan anak
2. Adanya kebijakan yang melindungi anak perempuan sehingga bebas dari praktik eksploitasi, kekerasan seksual, trafficking, perkawinan anak, baik dalam situasi konflik dan non konflik.
3. Adanya kebijakan yang melarang berbagai bentuk praktek sunat perempuan

16.3 Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua

1. Adanya kebijakan yang memastikan bahwa perdamaian juga dibarengi dengan adanya akses kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi perempuan korban, mengakhiri impunitas dan jaminan tidak berulang.
2. Adanya jaminan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam Prolegnas 2015-2019 a.l. RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Disabilitas, RUU KHUP/ KUHAP, revisi UU Perkawinan, ratifikasi Konvensi ILO dan Revisi UU Paket Perlindungan PRT dan Pekerja Migran.

16.6 Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level

1. Adanya pengembangan pedoman pelayanan minimal dan standar sistem rujukan bagi perempuan korban Lintas K/L, termasuk untuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
2. Terbangunnya sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT – PKKTP) diadopsi dan terimplementasi
3. Adanya mekanisme perlindungan saksi dan korban diperkuat untuk jaminan bagi perempuan dan anak.
4. Adanya sarana, sumber daya, finansial, sumber daya manusia, dan akses yang

memadai untuk lembaga penyedia layanan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan.

5. Terbentuknya mekanisme pencegahan nasional (national Prevention Mechanism) NPM untuk membuka akses pemantauan reguler di dalam tahanan dan serupa tahanan.

6. Tersedianya mekanisme tahanan yang ramah dan melindungi perempuan

7. HAM berperspektif gender terintegrasi dalam reformasi sektor pertahanan dan keamanan.

8. Adanyakelembagaan pengujian peraturan perundang-undangan, termasuk JR terbuka di MA dan uji hak konstitusional di MK.

16.9 Pada tahun 2030, menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran

Pada 2030, identitas legal bagi semua dipenuhi, termasuk akte nikah dan sertifikat kelahiran tanpa diskriminasi berdasarkan apapun.

16.10 Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional

1. Adanya kebijakan negara mengakui dan member perlindungan serta akses keadilan kepada Perempuan Pembela HAM, membebaskan yang dikriminalkan serta mengusut tuntas kasus pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan seksual (KS) pada jurnalis dan PPHAM.

16.a memperkuat institusi nasional yang terkait, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk pengembangan kapasitas pada semua level, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan

1. Laporan negara secara berkala untuk melaksanakan UNSCR 1325 dan RAN perempuan, perdamaian, dan keamanan terimplementasi hingga wilayah local

2. Komnas Perempuan sebagai NHRI dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan

dalam berbagai dimensi, termasuk hak EKOSOB.

3. Reformasi di sektor keamanan sebagai kunci untuk mencegah kekerasan seksual di wilayah konflik.

4. Peningkatam program negara membangun kapasitas perempuan sebagai agen perdamaian.

Gol 17 :

Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

TARGET

17.1 Menguatkan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui bantuan internasional kepada negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik dalam hal pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya

17.2 Negara-negara maju mengimplementasikan secara penuh komitmen ODA mereka, termasuk komitmen yang dibuat oleh banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari ODA/GNI bagi

INDIKATOR

Peningkatan transparansi pengelolaan bantuan asing

1. Peningkatan mobilisasi sumber dana bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, melalui perencanaan pembangunan nasional dan hibah internasional

negara-negara berkembang dan 0,15 – 0,20 persen dari ODA/GNI bagi negara-negara kurang berkembang; pemberi ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk dapat memberikan setidaknya 0,20 persen dari ODA/GNI kepada negara-negara kurang berkembang

2. Peningkatan mobilisasi sumber dana bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, melalui perencanaan pembangunan nasional dan hibah internasional.

3. Peningkatan Gender Responsive Budget dan Planning untuk mendukung implementasi SDGs.

4. Peningkatan alokasi anggaran untuk women national machinery termasuk Pusat Kajian Perempuan dan Gender, Kementerian Perempuan, Komnas Perempuan

17.6 Memperbanyak kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan segitiga regional dan internasional mengenai akses terhadap sains, teknologi dan inovasi dan memperbanyak berbagi pengetahuan mengenai syarat yang disepakati bersama, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik diantara mekanisme yang sudah ada, khususnya pada level PBB, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global

Adanya kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan dalam bidang pemberdayaan perempuan, KB, teknologi utk perempuan dll

17.7 Mendukung perkembangan, transfer, diseminasi dan difusi teknologi ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang dengan syarat lunak, termasuk syarat konsesi dan preferensial, sebagaimana yang telah disepakati bersama

1. Presentase perempuan yang terlibat dalam alih teknologi (ramah lingkungan)

2. Adanya regulasi/kebijakan untuk pembangunan, alih teknologi, penyebaran dan difusi teknologi ramah lingkungan, termasuk ramah perempuan (women friendly) kepada negara2 berkembang dengan kondisi tidak mengikat, termasuk kondisi pilihan dan konsesi, sebagaimana disetujui.

17.8 Secara penuh mengoperasionalisasi bank teknologi dan sains, mekanisme pengembangan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan memperbanyak penggunaan teknologi yang memungkinkan, terutama teknologi informasi dan komunikasi

Peningkatan program training/pelatihan bagi perempuan untuk peningkatan kapasitas teknologi dan inovasi terbaru

17.15 Menghargai ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk membuat kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan

1. Adanya affirmative action bagi pelibatan perempuan dan remaja putri dlm menerapkan kebijakan-kebijakan penurunan kemiskinan
2. Adanya regulasi/kebijakan untuk menghormati ruang setiap kebijakan negara lain dan tata cara kepemimpinan untuk menciptakan dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan gender, serta pembangunan berkelanjutan.

17.17 Mendorong dan mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif, yang dibangun dari pengalaman dan strategi dalam bermitra

Presentase partisipasi perempuan dan kelompok rentan yang marginal dalam promosi kegiatan public private and CSO partnership dan sharing pengalaman dan dana

17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, untuk secara signifikan meningkatkan ketersediaan data yang bermutu tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan, diagregat menurut pendapatan, gender, usia, suku, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan

Data terpilah tentang kesenjangan gender diberbagai bidang berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik relevan lain dalam konteks nasional

karakteristik lainnya yang relevan dalam konteks nasional

17.19 Pada tahun 2030, membangun dari inisiatif-inisiatif yang ada untuk mengembangkan ukuran kemajuan terhadap pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto dan mendukung

Peningkatan program untuk memastikan perempuan terlibat dalam berbagai inisiatif yang mengembangkan cara-cara pengukuran kinerja pembangunan berkelanjutan dan kapasitas statistik

Penutup

Kami atas nama GPPI mengucapkan terima kasih atas partisipasi banyak kelompok dalam membuat buku usulan ini. Kemungkinan saja masih banyak isu-isu penting terkait dengan pemenuhan HAM Perempuan dan anak yang tertinggal dalam pembahasan ini. Kami berharap penyempurnaan indikator gender dalam Pembangunan Berkelanjutan bisa dilakukan di masa depan. Oleh karena itu buku ini seperti living document yang setiap saat bisa diperkaya substansinya dan dirombak struktur penulisannya untuk menjadi buku yang lebih lengkap. Partisipasi semua pihak sangat kami apresiasi dalam mendukung terbitnya buku ini.



Tentang Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI)

“Gerakan Perempuan Peduli Indonesia” adalah sebuah jaringan kerja antar berbagai organisasi perempuan (seperti Mitra Perempuan, AMAN Indonesia, PD Politik, Kalyanamitra, Yayasan Kesehatan Perempuan, PKBI Pusat, dan lain-lain), individu, KOMNAS Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan organisasi sosial lainnya yang aktif bekerja di berbagai isu hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Dalam kerangka kerja advokasinya, Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) menjadikan Beijing Platform For Action (BPFA) dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai target advokasi.

SDGs mempunyai 17 goals dan 169 target untuk mencapai planet 50-50 antara perempuan dan laki-laki. Pada tanggal 4 September 2015, GPPI telah bekerjasama dengan BAPPENAS menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Pengarusutamaan Gender Dalam SDGs. Konsultasi ini dihadiri oleh organisasi perempuan, pemerintah, organisasi non pemerintah, badan PBB dan badan donor. Adapun hasil pertemuannya adalah adanya analisis serta integrasi CEDAW, ICPD dan BPFA kedalam SDGs dan laporan diskusi indicator berperspektif gender dalam 17 Goals yang menggunakan baseline laporan CSO dan pemerintah mengenai CEDAW, ICPD, BPFA dan MDGs. Draft Perspektif Gender di SDGs telah disosialisasikan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Saat ini GPPI membuat indikator nasional dari 17 Goals SDGs.

Kordinator GPPI,
Rita Kalibonso
(0818772726)